

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir abad 20-an, aturan dunia telah menjadi lebih rumit dari masa-masa sebelumnya. Bahkan beberapa ilmuwan menyatakan bahwa dunia telah memasuki fase baru dimana teknologi yang telah berkembang dengan pesat, pembangunan komunikasi dan informasi yang terus mengalami kemajuan, interaksi dan kerjasama antar negara yang juga terus bermunculan.¹ Oleh karena itu, pembangunan merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap negara. Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kebijakan dan strategi untuk menuju arah yang diinginkan.² Selain ekonomi, sosial, dan budaya, pembangunan juga mencakup urusan politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, bahkan hingga budaya. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, dan mencapai sebuah kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik.³

Salah satu organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi banyak negara di dunia, membantu untuk mewartakan dari sebuah agenda pembangunan. Agenda pembangunan pertama diperkenalkan sebagai Millennium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati oleh 189 negara dan

¹ Poppy Irawan, "Crafting the Alternative of Finance Hegemony: Returning Gold Dinar Exchange Economy" *Andalas Journal of International Studies*, Vol 1, No 1, Hal:36

² Deddy Tikson, *Keterbelakangan dan Ketergantungan: Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand* (Makassar: Innawa, 2015), 7.

³ Oksfriani Jufri S. dan Jack Roebijoso, *Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

dilaksanakan sejak bulan September 2000 hingga tahun 2015.⁴ MDGs merupakan delapan tujuan yang memiliki target yang dapat diukur dan batas waktu penyelesaian yang jelas untuk meningkatkan kondisi kehidupan orang-orang yang kurang mampu di dunia.⁵

Setelah terlaksana agenda pembangunan pertama, tidak puas dengan hasil MDGs, PBB kembali memperkenalkan agenda pembangunan baru yang akan melanjutkan pelaksanaan MDGs yang belum selesai, agenda pembangunan tersebut diperkenalkan dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 193 anggota PBB yang menyepakati untuk mengadopsi dan mengimplementasi agenda pembangunan SDGs yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan di negara kurang berkembang. SDGs juga diharapkan dapat memobilisasi lebih banyak aktor untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang.⁶ Kedua agenda pembangunan dari PBB dimaksudkan agar dapat diadopsi oleh setiap negara anggota untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang ada demi menciptakan pembangunan yang lebih baik.⁷

Salah satu isu pembangunan yang terus diikutsertakan dalam kedua agenda pembangunan adalah isu pendidikan. Dalam MDGs tujuan kedua diinginkan

⁴ United Nations, "MDG Acceleration and Beyond 2015, United Nations (2013): 3 <http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>. (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2017).

⁵ "Millennium Development Goals", MDG Fund, <http://www.mdgfund.org/node/922> (Diakses pada tanggal 27 September 2018).

⁶ *Ibid.*

⁷ UNDP, "Transitioning from the MDGs to SDGs," United Nation (Juni 2015): 1, <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/English/Transitioning%20from%20the%20MDGs%20to%20the%20SDGs.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2017).

tercapainya pendidikan dasar untuk semua. Dan dalam SDGs isu pendidikan ini kembali dibahas dalam tujuan keempat yaitu diinginkan tercapainya pendidikan yang berkualitas. Didalam tujuan keempat SDGs tersebut, diharapkan adanya jaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.⁸

Sebanyak 189 negara anggota PBB yang setuju mengadopsi agenda pembangunan MDGs dan 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan SDGs di negaranya. Negara anggota PBB tersebut terdiri dari negara kurang berkembang, negara berkembang, serta negara maju. Salah satu negara yang mengadopsi agenda pembangunan PBB adalah Indonesia. Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan MDGs dan SDGs dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong HAM dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.⁹ Salah satu tujuan yang diadopsi oleh Indonesia adalah tujuan mengenai pendidikan. Indonesia mengadopsi agenda pembangunan PBB dengan menselaraskannya dengan rencana pembangunan nasional, semua tujuan dari agenda pembangunan PBB diadopsi kedalam rencana pembangunan nasional.

Tujuan agenda pembangunan pendidikan akan membantu Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan pendidikan yang terus Indonesia hadapi.

⁸ Bappenas, Draft metadata TPB tujuan 4, Hal: 1.

⁹ Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Indonesia Komitmen Implementasikan Agenda 2030 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12183&Itemid=55 (diakses pada tanggal 10 Februari 2018)

Saat ini, pendidikan di Indonesia merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di kawasan Asia, dan keempat terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 50 juta murid sekolah dan 2,6 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia.¹⁰ Dengan kondisi pendidikan seperti itu, dalam *Program for International Student Assessment (PISA)*¹¹ pada 2015 menyatakan bahwa Indonesia berada pada ranking 62 dari 72 negara yang menjadi negara yang dinilai oleh PISA.¹²

Didalam Laporan PISA 2015, juga dijelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal dalam pembangunan kualitas pendidikan, didukung pula dengan penganggaran 20% dari APBN untuk pendidikan.¹³ Tetapi dengan hasil dari penilaian PISA tersebut dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki modal tetapi tidak tergunakan dengan maksimal. Karna pendidikan Indonesia masih sangat memerlukan perbaikan dan peningkatan yang signifikan dan modal yang dimiliki oleh pendidikan Indonesia haruslah digunakan dengan semaksimal mungkin.¹⁴

Selain masih berada di bawah negara lain dalam hal pendidikan, permasalahan pendidikan yang masih terus dialami adalah ketimpangan pembangunan pendidikan antar wilayah di Indonesia. Anak yang lahir di Papua rata-rata meninggalkan sekolah

¹⁰ "World Bank and Education in Indonesia", The World Bank (September 2014), <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia> (Diakses pada tanggal 27 September 2018).

¹¹ Salah satu program yang melakukan penilaian dalam bidang pendidikan dunia yang dilakukan oleh OECD setiap tahunnya.

¹² Arnaldo Pellini, Indonesia's PISA result show need to use education resources more efficiently, <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/18/indonesias-pisa-results-show-need-to-use-education-resources-more-efficiently.html> (diakses pada tanggal 6 juni 2017)

¹³ Kementerian Keuangan RI, Perekonomian Indonesia dan APBN 2017, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> (Diakses pada tanggal 6 Juni 2017)

¹⁴ OECD, "PISA 2015 Result", <https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf> (Diakses pada tanggal 20 Juni 2018)

setelah sekitar 6 tahun masa pendidikan, dibandingkan anak-anak di Jakarta yang rata-rata dapat menyelesaikan 11 tahun masa sekolahnya.¹⁵

Dalam pembangunan nasional pendidikan di Indonesia, dimulai dari pendidikan dasar dan menengah, pembangunan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut adalah data APM di Indonesia.¹⁶

Tabel 1.2 Data APM Tahun 2004 & 2015 Di Indonesia Menurut Wilayah

Wilayah	APM 2004 & 2015					
	SD 2004	SD 2015	SMP 2004	SMP 2015	SMA 2004	SMA 2015
Sumatera	93,94	85,43	61,27	62,74	41,74	54,32
Jawa, Bali	95,12	83,36	59,44	69,64	39,77	56,31
Kalimantan, Sulawesi	92,75	85,57	50,51	61,95	35,00	53,66
Nusa Tenggara, Maluku, Papua	89,98	76,53	51,79	58,50	34,63	53,86
Nasional	94,12	81,54	58,06	62,2	39,24	51,55

(Sumber : Kemendikbud, APK/APM Indonesia 2004-2017, http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php?cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=000000&tahun=2017, diakses pada tanggal 28 Juni 2018)

Dari tabel di atas, terlihat ketimpangan hasil pembangunan pendidikan antar wilayah di Indonesia. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih memiliki nilai APM relatif jauh dibanding nilai APM nasional dan APM wilayah Sumatera dan Jawa, Bali.

Selain dalam hal APM, ketimpangan pembangunan pendidikan di Indonesia juga terlihat dari jumlah guru yang tersebar di wilayah di Indonesia. Terdapat kesenjangan rasio guru terhadap jumlah sekolah di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali dengan wilayah timur Indonesia. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

¹⁵ Samer Al-Samarrai, "In Indonesia, Tackling Education Inequality Through Better Governance", The World Bank, <http://blogs.worldbank.org/education/indonesia-tackling-education-inequality-through-better-governance> (Diakses pada tanggal 27 September 2018).

¹⁶ Kemendikbud, APK/APM Indonesia 2009-2017, http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php?cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=000000&tahun=2017 (Diakses pada tanggal 10 April 2018).

Tabel 1.2 Data Rasio Guru di Indonesia

Wilayah/Provinsi	Rasio Guru Sekolah		
	SD	SMP	SM
Sumatera	12.21	17.22	21.69
Jawa, Bali	12.48	20.19	22.43
Kalimantan	11.47	10.78	17.74
Sulawesi	10.01	13.30	18.30
NTB	12.18	13.95	16.54
NTT	9.90	11.40	17.53
Maluku	10.64	13.41	18.50
Maluku Utara	7.39	9.17	11.15
Papua	5.75	12.13	15.96
Papua Barat	5.25	11.19	11.89

(Sumber : Kemendikbud, Rasio Guru Indonesia, http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/Dir/isi_AA46E7FA-90A3-46D9-BDE6-CA6111248E94_.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2018)

Hal tersebut menjadikan pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat membutuhkan pembangunan yang signifikan di Indonesia. Indonesia diharuskan memiliki program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan hal tersebut tidaklah harus hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus ikut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

Pokok permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan agenda pembangunan PBB bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan di Indonesia terus membaik setiap tahunnya. Tetapi yang terus menjadi masalah adalah terus terjadinya ketimpangan pembangunan pendidikan di antar-wilayah di Indonesia. Dalam pembangunan pendidikan di Indonesia juga terdapat kekurangan tenaga kerja pengajar di beberapa wilayah, terutama di wilayah timur, hal tersebutlah yang membuat ketimpangan tersebut terus terjadi.

Hal ini menarik untuk diteliti karena dengan meneliti kepatuhan Indonesia, dapat dilihat bagaimana Indonesia mengimplementasikan agenda pembangunan PBB bidang pendidikan, dan bagaimana agenda pembangunan tersebut berdampak bagi pembangunan di Indonesia. Dengan meneliti hal ini, juga diharapkan akan terlihat dari proses implementasi yang mana yang membuat kesenjangan pembangunan terjadi, dan menjadi acuan dalam menjalankan agenda pembangunan seterusnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang peneliti akan coba jawab adalah:
Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap agenda pembangunan PBB bidang pendidikan?

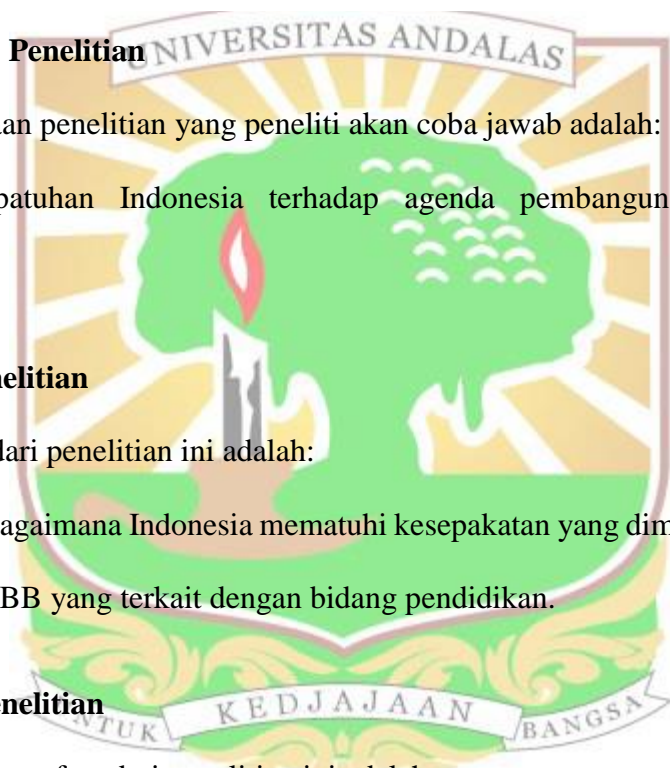
1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk melihat bagaimana Indonesia mematuhi kesepakatan yang dimuat dalam agenda pembangunan PBB yang terkait dengan bidang pendidikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai proses pembelajaran bagi peneliti sendiri dan atau bagi orang-orang lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai kepatuhan Indonesia terhadap agenda pembangunan PBB.
2. Sebagai tambahan literatur bagi penelitian terkait selanjutnya.



1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti merujuk kepada penelitian-penelitian yang masih berhubungan dengan topik yang peneliti angkat. Studi pustaka ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan sehingga dapat melihat perbedaan-perbedaan dalam setiap penelitian serta memperkaya bahasan peneliti.

Untuk penelitian pertama adalah jurnal yang berjudul *Compliance with International Environmental Regimes: Chinese Lessons*, dalam jurnal tersebut Roda Mushkat menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang mengakibatkan sebuah negara mematuhi atau tidak mematuhi sebuah rezim, dan hal tersebut bukan hanya mengenai kepentingan nasional sebuah negara tersebut. Di jurnal ini Roda memberikan contoh kasus Tiongkok dan Rezim Lingkungan Internasional.¹⁷

Terdapat hubungan yang rumit antara Tiongkok dan Komunitas Internasional, yang hingga sekarang mendapatkan sedikit perhatian walaupun disposisi, fokus dan intensitas dari permasalahan tersebut terus berkembang. Tiongkok tidak dapat dikategorikan sebagai aktor yang mainstream dalam hal hubungan politik-ekonomi internasional. Tiongkok dianggap memiliki pengaruh yang besar dari nilai-nilai western. Dari pandangan western, Tiongkok dianggap telah memiliki banyak pengalaman dalam tergabung didalam kerjasama internasional bahkan hingga keluar dari sebuah kerja sama internasional.

¹⁷ Roda Mushkat, *Compliance with International Environmental Regimes: Chinese Lessons*, William & Mary Environmental Law and Policy Review, Volume 34, Issue 2, Article 4.

Tiongkok masih dianggap sebagai tingkatan menengah atau *regional power* karena masih terdapatnya beberapa bagian dari Tiongkok yang masih belum sepenuhnya terbangun dengan baik dan juga dikarenakan tantangan-tantangan sulit yang dimiliki oleh Tiongkok sendiri. Banyaknya faktor yang mempengaruhi yang dimiliki oleh Tiongkok akan mempersulit untuk melihat bagaimana sikap Tiongkok dalam bertanggung jawab dalam kerjasama internasional yang telah disetujuinya.

Selain hal yang dijelaskan diatas, Tiongkok juga menghadapi banyak tantangan dan dilema dalam hal lingkungan. Populasi yang meningkat dengan sangat cepat dan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat tetapi dibarengi dengan terdapat tantangan mengenai sumber energi alami yang terus berkurang, dan juga tekanan yang berasal dari daerah perbatasan memberikan tantangan tersendiri bagi Tiongkok, dan hal ini telah memenuhi kriteria untuk menjadi perhatian global. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi meningkatnya ketertarikan mengenai Hukum dan Peraturan tentang Lingkungan di Tiongkok. Penstudi dan professor berfokus dengan isu domestik maupun dari sisi internasional. Dan kepatuhan terhadap rezim yang berasal dari luar juga telah mendapatkan perhatian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pengalaman Tiongkok mengenai isu lingkungan ini dapat memberikan banyak pelajaran, dimulai dari bagaimana cara mengambil keputusan hingga bagaimana memutuskan konsep institusi dan pemilihan instrumen dalam menjalankan strategi lingkungan. Pilihan-pilihan tersebut juga dipengaruhi dari kemampuan negara dalam melaksanakannya, dan bagaimana analisis yang dilakukan diawal.

Tulisan Roda Mushkat ini membantu peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang kepatuhan sebuah negara terhadap rezim, tetapi tulisan tersebut juga memiliki

perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Tulisan tersebut membahas kepatuhan Tiongkok terhadap rezim lingkungan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim pembangunan.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Rahmi Hidayati yang berjudul *Tingkat Kepatuhan Negara Anggota Uni Eropa Dalam Regulation On The Removal Of Fins Of Shark On Board Vessel*. Dalam jurnal tersebut Rahmi Hidayati menjelaskan mengenai Uni Eropa yang telah menyetujui untuk menghentikan kegiatan shark finning dengan cara mengeluarkan peraturan di tahun 2003 yaitu *regulation on the removal of fins of shark on board vessel*. Dengan melakukan tindakan tersebut maka diperlukan untuk menindaklanjuti sejauh mana negara-negara anggota mematuhi peraturan yang telah disetujui oleh Dewan dan Komisi Eropa.¹⁸

Negara-negara anggota Uni Eropa telah dilarang untuk melakukan kegiatan memancing atau melakukan perburuan hiu di wilayah perairan Uni Eropa, namun hal tersebut membuat para nelayan dari negara-negara anggota Uni Eropa melakukan aktivitasnya di wilayah perairan lain, yaitu di wilayah Atlantik Utara, Atlantik Tengah, Atlantik Selatan, Samudra India, hingga Samudra Pasifik yang terdapat beberapa spesies hiu tereksplorasi.

Selain itu, indikasi bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak patuh terhadap regulasi tersebut dikarenakan tidak terdapat sanksi (*punishment*) yang cukup kuat untuk para pelaku kegiatan eksploitasi kepada hiu (*shark finning*). Kegiatan

¹⁸ Rahmi Hidayati, *Tingkat Kepatuhan Negara Anggota Uni Eropa Dalam Regulation On The Removal Of Fins Of Shark On Board Vessel*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, UNMUL.

tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional. Jika kegiatan tersebut tidak diminimalisir, maka dikhawatirkan jumlah spesies hiu dapat terancam punah, dimana nantinya dapat mengakibatkan terganggunya ekologi laut. Oleh karena itu masyarakat internasional berupaya untuk membantu menanggulangi permasalahan tersebut.

Dari upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa melalui peraturan tersebut dapat terlihat sejauh mana tingkat kepatuhan negara-negara anggotanya. Didasari oleh sebuah regulasi yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan segala perubahan di dalam peraturannya dan dengan melihat implementasi dari negara-negara anggotanya dalam mematuhi peraturannya, hal tersebut yang menjadi tolak ukur tingkat kepatuhannya.

Tulisan ini memiliki kesimpulan bahwa dalam penegakan peraturan Uni Eropa untuk menghentikan aktivitas *shark finning* belum cukup efektif dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, dikarenakan terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian didalam isi peraturan tersebut. Selain itu, hingga saat ini negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki pengaruh yang kuat dalam industri perikanan tetap melakukan perburuan hiu dengan cara *shark finning* untuk diperjual belikan, terutama di ekspor ke negara-negara Asia Timur yaitu Tiongkok.

Tulisan Rahmi Hidayati ini membantu peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang kepatuhan sebuah negara terhadap rezim, tetapi tulisan tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Tulisan tersebut membahas kepatuhan negara-negara Uni Eropa terhadap kesepakatan mengenai *shark finning*,

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap agenda pembangunan PBB.

Penelitian ketiga adalah tulisan oleh Lisbet yang berjudul *Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui Kerja sama Internasional*. Dalam tulisan tersebut Lisbet menjelaskan bagaimana Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam MDGs. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia.¹⁹ Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa bantuan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional tidak hanya dengan negara maju akan tetapi juga dengan negara berkembang sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.

Tulisan Lisbet tersebut menyimpulkan bahwa adanya perubahan yang signifikan di negara-negara yang berhasil dalam mencapai MDGs semakin membuktikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana yang menjadi cita-cita MDGs. Demikian pula dengan Indonesia, negara ini memiliki kesempatan yang sama dengan negara lainnya untuk dapat mencapai kedelapan tujuan MDGs.

Dalam implementasinya, Indonesia menemukan kendala-kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Kendala Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lebih banyak dikarenakan kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah serta

¹⁹ Lisbet, "Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui Kerja sama Internasional," *Politica* Vol. 4, No. 1 (Mei 2013), 129.

kurangnya keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang belum berhasil dalam MDGs.

Tulisan Lisbet ini membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana Indonesia mengimplementasi agenda pembangunan MDGs di Indonesia, tetapi tulisan tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Tulisan tersebut membahas pencapaian Indonesia dalam agenda pembangunan MDGs, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap agenda pembangunan PBB yang terkait dengan bidang pendidikan.

Penelitian keempat adalah tulisan yang berjudul *Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia* oleh Dyah Ratih Sulistyastuti.²⁰ Tulisan ini membahas mengenai bagaimana pembangunan pendidikan di Indonesia, melalui pencapaian salah satu goals yang membahas mengenai pendidikan di agenda pembangunan MDGs. Tulisan ini membahas tiga bagian utama, bagian pertama mengemukakan pentingnya program MDGs, bagian kedua memaparkan beberapa program pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, dan bagian ketiga adalah kajian tentang pencapaian program pendidikan di Indonesia.

Dalam tulisannya, Dyah Ratih Sulistyastuti menjelaskan bahwa *goals* yang terdapat dalam MDGs adalah berdasarkan pada pemenuhan hak dasar warga negara atau *right based approach*. Hak dasar/asasi manusia tersebut bersifat universal, legal, dan berlaku sama bagi setiap warga negara. Dan dengan digunakannya prinsip *right*

²⁰ Dyah Ratih Sulistyastuti. "PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN MDGs DI INDONESIA." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 2, no. 2 (2007): 19-44.

based approach, maka upaya untuk memberikan pelayanan bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam MDGs dengan ingin diwujudkannya *Education for All*.

Pemenuhan pelayanan pendidikan kepada seluruh warga negara menjadi prioritas yang akan diwujudkan di dalam MDGs karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat mewujudkan tiga hal. Pertama, dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan. Kedua, mampu berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Ketiga, memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Kesempatan untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan, dengan demikian, dapat pula digunakan sebagai instrumen yang paling efektif untuk memotong mata rantai atau lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), di mana kemiskinan terjadi karena rendahnya produktivitas orang kurang mampu yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (pendidikan dan kondisi kesehatan) orang kurang mampu tersebut. Rendahnya SDM orang kurang mampu itu sendiri disebabkan kondisi kemiskinan mereka sehingga mereka tidak mampu melakukan investasi untuk pendidikan dan kesehatan.

Pemenuhan pendidikan dasar adalah tujuan kedua dari MDGs. Diharapkan seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Dan sebagai salah satu negara yang meratifikasi MDGs, Indonesia harus lebih memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan dasar ini. Untuk dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium bidang pendidikan

tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan suatu langkah kongkrit dalam bentuk kebijakan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kebijakan tersebut tentu saja tidak hanya dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga perlu dukungan dari pemerintah daerah.

Dalam tulisan ini menyimpulkan beberapa hal mengenai pencapaian Indonesia terhadap MDGs dalam hal bidang pendidikan. Pertama, bahwa pemerintahan Indonesia masih belum memiliki keinginan yang kuat terhadap tujuan kedua dari MDGs sebagai prioritas dalam pembangunan. Hal ini terbukti bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan masih rendah, dan mengakibatkan kebijakan pendidikan cenderung bersifat pragmatis. Kedua, otonomi daerah justru makin mempersulit pencapaian MDGs karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ketiga, bantuan lembaga internasional terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Penelitian kelima yang menjadi acuan peneliti adalah tulisan dari Syahrial Loetan yang berjudul *Millennium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional di Indonesia*.²¹ Dalam tulisan ini, Syahrial Loetan menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam MDGs sudah banyak terdapat dalam landasan pembangunan seperti Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA), namun demikian dengan adanya MDGs akan semakin

²¹ Syahrial Loetan. "Millennium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional di Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003): 60.

memperkuat dan menyatukan pandangan antara pemerintah dan lembaga/negara donor dalam menjalankan kerjasamanya dengan hasil yang lebih terukur secara global.

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini mencerminkan bahwa pencapaian target MDGs bukanlah hal yang mudah. Cukup banyak kendala yang dihadapi seperti indeks pembangunan sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana dasar yang belum memadai, perekonomian yang belum pulih sepenuhnya dan pelaksanaan otonomi daerah yang belum optimal. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan harus melibatkan semua komponen yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan untuk mengupas persoalan dalam penelitian ini adalah Konsep Kepatuhan Rezim International. Konsep ini digunakan sebagai gagasan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada isu area hubungan internasional yang kian rumit dan kompleks. Hingga konsep rezim ini dapat menjadi salah satu elemen yang bertahan cukup lama dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional.²² Dengan konsep ini peneliti dapat menjelaskan bagaimana Indonesia mematuhi kesepakatannya untuk mengadopsi dan mengimplementasikan agenda pembangunan PBB bidang pendidikan di Indonesia.

²² Donald J. Puchala and Raymond F. Hopkins, "Rezim-rezim Internasional: Pelajaran dari analisis induksi," *International Organization*, Vol. 36, No.2, 244.

1.7.1 Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional. Pendapat lain mengenai definisi dari rezim internasional di sampaikan oleh Oran R. Young, Oran berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka.

Rezim Internasional juga dipahami sebagai bentuk perilaku aktor yang didasari oleh norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah masalah yang ada dan saling berketergantungan dalam bidang hubungan internasional.²³ Aktor-aktor yang terlibat, akan berupaya untuk menciptakan aturan bersama yang diharapkan akan membantu tercapainya tujuan kerja yang lebih efektif.²⁴ Rezim yang biasa dibuat berdasarkan fenomena-fenomena atau isu yang terjadi dalam sistem internasional dan diharapkan merupakan solusi dalam menyelesaikan fenomena atau isu-isu tersebut. Aktor-aktor yang terlibat diharapkan dapat mematuhi rezim yang telah dibuat dan disepakati bersama agar rezim dapat bekerja dengan semestinya dan dapat mempertahankan eksistensinya.²⁵

²³ Robert O. Keohane, "After Hegemony-Cooperation and Discord in The World of Political Economy," New Jersey.

²⁴ Sonny Sudiar, "Derajat Compliance dalam Rezim Kerjasama Sosek Malindo Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah", (Tesis: Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, 2011), 23.

²⁵ Chayes, 176.

Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins juga ikut serta menyampaikan pendapatnya mengenai rezim internasional. Puchala dan Hopkins menyatakan bahwa rezim internasional memiliki lima ciri utama, antara lain:²⁶

1. Mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma dan aturan,
2. Dapat menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan,
3. Mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkan, sebagaimana halnya sebuah norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpang,
4. Terdapat aktor yang berperan didalamnya (negara dan aktor bukan negara)
5. Eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocokkan nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan.

Berdasarkan penjelasan definisi penstudi rezim dan lima ciri utama tentang rezim internasional dari Puchala dan Hopkins, dapat buktikan bahwa agenda pembangunan PBB merupakan sebuah rezim internasional. Agenda pembangunan PBB merupakan sebuah kesepakatan dari negara anggota PBB yang menyediakan sebuah aturan, norma dan prosedur yang mengatur mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Agenda pembangunan PBB dapat mengontrol perilaku aktor yang terlibat didalamnya dalam hal pencapaian tujuan tujuan pembangunan dari negara yang telah sepakat untuk mengadopsi butiran butiran tujuan agenda pembangunan PBB.

²⁶ Puchala dan Hopkins, 246-247.

Agenda pembangunan PBB juga merupakan rezim internasional pembangunan yang muncul untuk membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang ada. Tujuan-tujuan yang ada dalam agenda pembangunan PBB dapat menjadi acuan bagi negara-negara dalam hal pembuatan kebijakan mengenai pembangunan.²⁷ Namun, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah melihat bagaimana kepatuhan Indonesia dalam agenda pembangunan PBB bidang pendidikan yang masih memerlukan konsep lain untuk menjelaskannya, yaitu konsep kepatuhan rezim Internasional.

1.7.2 Konsep Kepatuhan Rezim Internasional

Kepatuhan merupakan konsep yang berbeda, namun saling berkaitan dengan teori rezim kontemporer lainnya, yaitu implementasi dan efektivitas. Kepatuhan dapat kita lihat setelah adanya implementasi, sehingga implementasi menjadi sebuah langkah kritis terhadap kepatuhan. Secara bahasa, implementasi diartikan sebagai menjalankan, mencapai, memenuhi, menghasilkan atau melengkapi sejumlah tugas yang diberikan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²⁸

Compliance dalam bahasa Indonesia berarti kepatuhan yang berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut

²⁷ United Nations, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development," Sustainable Development, <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld> (Diakses pada tanggal 1 Februari 2018).

²⁸ Ronald B. Mitchell, "Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law," Oxford University Press Chapter 39, 1.

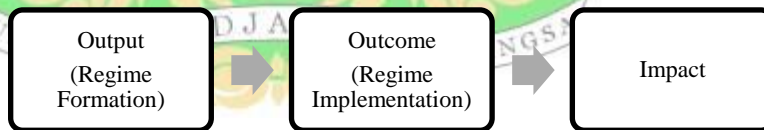
perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersih, patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Menurut Abraham Chayes dan Antonia Chayes, kepatuhan suatu negara dalam rezim internasional dapat dilihat ketika suatu negara masuk dan menyepakati sebuah rezim atau perjanjian internasional, setiap negara tersebut mau tidak mau harus mengubah tingkah laku, sikap dalam berhubungan dengan aktor lain serta mengubah ekspektasi terhadap sesama aktor.²⁹

Setelah tahapan implementasi dari sebuah rezim internasional, baru dapat dianalisis suatu kepatuhan. Dalam menganalisis kepatuhan atau compliance negara terhadap perjanjian regional maupun internasional dalam konteks rezim, dapat ditinjau melalui indikator yang menunjukkan apakah sebuah negara *comply* atau *non-comply*. Terdapat tiga indikator yang dirumuskan untuk mengukur compliance yaitu; *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.³⁰

Skema 1.1 : Indikator Kepatuhan Terhadap Rezim Internasional

Object



Outputs merupakan bentuk dari hasil implementasi sebuah negara terhadap sebuah rezim internasional. Output dapat terdiri dari peraturan-peraturan, kebijakan dan regulasi yang diadopsi sebuah negara dalam implementasinya terhadap sebuah

²⁹ Chayes, 176.

³⁰ Ronald B. Mitchell, 3.

perjanjian, yang kemudian ditransformasikan dari lingkup internasional menjadi kebijakan nasional. Dari menilai output yang dibuat oleh sebuah negara, akan mempermudah melihat kepatuhan negara tersebut, karena dengan pengadopsian rezim kedalam kebijakan nasional adalah tahap pertama yang bisa dilihat sebagai sebuah kepatuhan negara terhadap rezim internasional.

Sedangkan *outcome* adalah perubahan perilaku (*behavioral change*) yang dilakukan negara dalam mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Dalam menganalisis kepatuhan, tentu saja kita perlu melihat bagaimana perubahan perilaku yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat, apakah negara tersebut mengikuti aturan-aturan yang telah dihasilkan sebelumnya (*output*). Perubahan perilaku ini berhubungan dengan bagaimana sebuah negara bersikap demi mencapai sebuah kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat.

Sementara *impact* (*environmental change*) merupakan kondisi lanjutan terhadap perubahan lingkungan yang dapat dilihat setelah tahapan *outcome*. Dengan adanya perubahan perilaku oleh negara atau aktor-aktor yang terlibat didalam suatu rezim, tentu saja akan menghasilkan suatu perubahan terhadap lingkungan disekitar rezim tersebut. Perubahan tersebut dapat berupa seperti peningkatan ataupun penurunan dari kondisi lingkungan yang berhubungan dengan rezim yang sedang diimplementasikan

Sebuah negara dikategorikan patuh (*comply*) adalah ketika telah mematuhi komitmen sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dari kepatuhannya menjalankan komitmen. Sebaliknya negara yang tidak patuh (*noncomply*) adalah ketika negara

tersebut tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen yang telah disepakati berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara dikatakan patuh ketika perilaku dari suatu subjek tertentu sesuai dengan aturan perilaku yang telah ditetapkan. Sebaliknya, negara dikatakan tidak patuh jika ada perilaku yang menyimpang dari ketetapan yang seharusnya.³¹

Dalam menganalisis kepatuhan, terdapat pengkategorian tingkat kepatuhan sebuah negara. Menurut Sarah McLaughlin Mitchell dan Paul R. Hansel, kategori tingkat kepatuhan suatu negara dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 Kategori Tingkat Kepatuhan

	Compliance	Non-Compliance
Active	<i>Sharing information, mitigate uncertainty of capabilities, resolve, interest. High rate compliance</i>	<i>Gives an alternatives, more sharing information, need a institutional settlement, legitimacy by member state</i>
Passive	<i>Increasing interaction opportunities, lengthening the shadow of future, rising the reputation costs for renegeing on arrangement.</i>	<i>Agreements hard to strike, bargains that are reached very durable, effects are amplified as the number of shared institution memberships increases, engenders broader reputation costs</i>

(Sumber: Diolah dari International Institutions and Compliance with Agreements, Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 4, October 2007, hal 721-737)

Sebuah negara dikatakan *Active Compliance* adalah ketika negara tersebut telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama. Sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi tentang keberhasilannya dalam menjalankan komitmen, dan secara tidak langsung dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Selain *Active Compliance*, sebuah negara dapat dikategorikan *Passive Compliance*. Hal ini dapat di lihat dari komitmen yang dijalankan sepenuhnya,

³¹ Abraham Chayes dan Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements*, (London : Harvard University Press, 1995), 10-15.

akan tetapi kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Namun mereka memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Pada fase ini kesepakatan menjadi lebih lama dan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk menegosiasikan komitmen komitmen baru.³²

Sebuah negara dapat dikategorikan *Active Non-Compliance* adalah ketika negara tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen komitmen dan aturan yang telah disepakati. Akan tetapi negara tersebut tidak patuh dengan memberikan alternatif-alternatif komitmen atau kebijakan baru dalam menyelesaikan masalah. Negara yang masuk dalam kategori ini membutuhkan sebuah badan legitimasi dan penguatan-penguatan komitmen. Yang terakhir adalah *Passive Non-Compliance* yang merupakan kategori negara tidak kooperatif yang tidak menjalankan komitmen dan tidak juga memberikan pengaruh ataupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.³³

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi adalah sebuah prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk melihat bagaimana pengetahuan tentang fenomena yang ada dapat diperoleh. Metode penelitian juga dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian yang sistematis dan konsisten agar hasil yang akan didapatkan nantinya menjadi lebih baik seperti yang diharapkan.

³² Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel, *International Institutions and Compliance with Agreements*, *American Journal of Political Science* (2007), Vol. 51, No. 4, hal 721-737.

³³ *Ibid*,

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses-proses dalam penelitian kualitatif akan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapat.³⁴

Berdasarkan tujuannya, penelitian kualitatif menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.³⁵ Dengan menggunakan metode dan jenis penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap agenda pembangunan PBB dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, peneliti diharapkan mampu menyampaikan serta menjawab permasalahan yang diteliti secara lebih rinci.

1.8.2 Batasan Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup bahasan tentang perilaku Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati untuk mengadopsi dan mengimplementasikan agenda pembangunan PBB kedalam agenda pembangunan nasionalnya, yang salah satu tujuannya membahas mengenai pembangunan pendidikan. Peneliti memberi

³⁴ John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition*, California, SAGE Publication (2013).

³⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persamda Press, 2008), 186.

batasan waktu dalam penelitian ini, dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Batasan tersebut diambil karena sepanjang periode diatas Indonesia mulai ikut andil dalam pengadopsian agenda pembangunan dari PBB, dimulai dari MDGs kemudian agenda pembangunan lanjutan SDGs.

1.8.3 Unit Analisis

Unit analisa adalah unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan dianalisa dalam sebuah penelitian. Sementara unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variable independen.³⁶ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Negara Indonesia. Dan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah Rezim Pembangunan Internasional, Agenda Pembangunan PBB.

1.8.4 Level Analisis

Tingkat analisa merupakan area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisa dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian ini akan ditekankan.³⁷ Dan level analisis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah negara.

1.8.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain melalui *library research*. *Library research* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, makalah, artikel dari

³⁶ Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), Hal: 108.

³⁷ Ibid, 35.

internet dan literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan topik yang dibahas peneliti. *Library research* adalah suatu metode yang dilakukan demi didatakannya data dan fakta sejarah yang dilakukan dengan membaca literatur, dokumen atau arsip yang tersimpan dalam perpustakaan dan berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.³⁸

Penelitian ini akan menggunakan data campuran yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari situs resmi BAPPENAS, UNDP, OECD dan UNESCO yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan bagaimana dinamika proses kepatuhan dari Indonesia terhadap agenda pembangunan PBB bidang pendidikan. Dokumen yang akan dianalisis berupa laporan mengenai pelaksanaan agenda pembangunan PBB bidang pendidikan baik dari pihak Indonesia maupun hasil dari PBB. Selain itu laporan-laporan dari OECD juga menjadi sumber data untuk peneliti menganalisis terkait kepatuhan Indonesia. Data sekunder didapatkan melalui sumber tertulis yang digunakan seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, situs berita internasional serta nasional yang membahas mengenai Agenda Pembangunan PBB di Indonesia terkait bidang pendidikan, juga akan dijadikan sumber data yang nantinya akan peniliti analisis.

³⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Hal: 27.

1.8.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.³⁹ Miles dan Huberman menjabarkan tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif, diantaranya meliputi⁴⁰:

1. Reduksi Data, merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi pokok dari laporan, jurnal, berita maupun artikel yang sudah dikumpulkan sebelumnya mengenai Agenda Pembangunan PBB, Pendidikan di Indonesia, dan sikap kepatuhan Indonesia terhadap rezim pembangunan tersebut. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

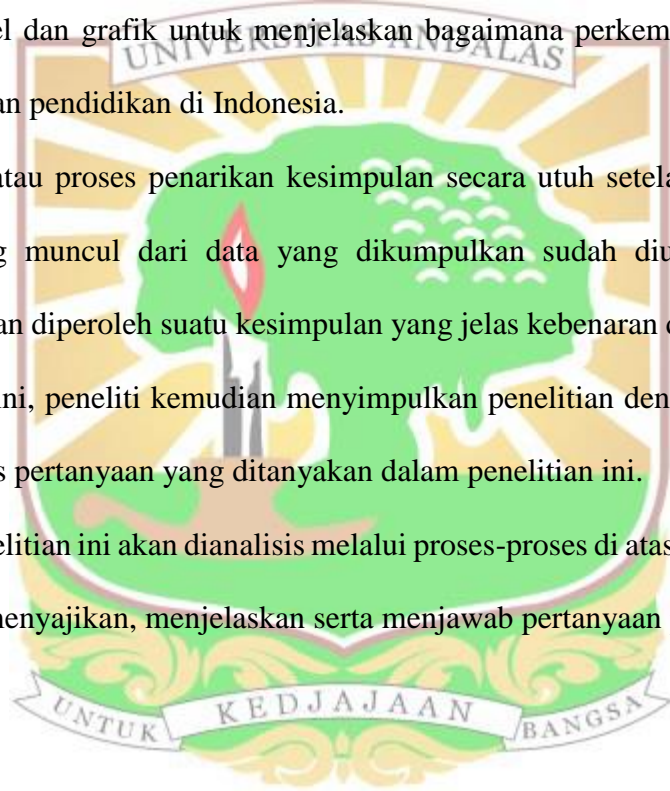
³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D" dalam M. Jahari, "Masuknya Agama Islam di Teluk Betung dan Pola Pengembangan Ajaran Agama Islam di Teluk Betung", (Skripsi Strata-1, Universitas Lampung: 2013), 18, <http://digilib.unila.ac.id/916/10/BAB%203.pdf>, (Diakses pada 25 Oktober 2017).

⁴⁰ Miles dan Huberman dalam Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", dalam Anita Rahmawati, "Tinjauan Historis Agresi Militer I di Sumatera Timur Tahun 1947", (Skripsi Strata-1, Universitas Lampung: 2014), 26, <http://digilib.unila.ac.id/4154/16/BAB%20III.pdf>, (Diakses pada 25 Oktober 2017).

2. Penyajian data, dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, sebagian besar penyajian data disajikan melalui teks yang bersifat naratif, terutama penjelasan yang berkaitan dengan isu pembangunan pendidikan di Indonesia, dan proses bagaimana Indonesia terlibat dalam rezim agenda pembangunan PBB bidang pendidikan. Selain dalam bentuk teks, peneliti juga menyajikan data statistic melalui tabel dan grafik untuk menjelaskan bagaimana perkembangan hasil dari pembangunan pendidikan di Indonesia.

3. Verifikasi, atau proses penarikan kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang dikumpulkan sudah diuji kebenarannya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Pada tahap ini, peneliti kemudian menyimpulkan penelitian dengan menyediakan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan dalam penelitian ini.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis melalui proses-proses di atas sehingga peneliti mampu untuk menyajikan, menjelaskan serta menjawab pertanyaan penelitian dengan valid.



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang peneliti memilih topik yang akan diteliti dan menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian nantinya akan dilakukan.

BAB II : AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

Bab ini menjelaskan tentang rezim pembangunan dari PBB, dimulai dari sejarah, ruang lingkup serta dinamika rezim pembangunan tersebut.

BAB III : PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang penjelasan mengenai pembangunan pendidikan yang Indonesia lakukan.

BAB IV : ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP AGENDA PEMBANGUNAN PBB BIDANG PENDIDIKAN

Dalam bab ini akan dianalisis data-data yang telah ditemukan sebelumnya menggunakan konsep penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis ini yang nantinya diharapkan dapat menunjukan bagaimana kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasi agenda pembangunan PBB bidang pendidikan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian penelitian selanjutnya yang masih terkait dengan penelitian ini.

